

Pendampingan Sistem Laporan Keuangan Bumdes sebagai Pilar Pengembangan Desa Mandiri

Enni Savitri^{1*}, Andreas², Volta Diyanto³, Riska Natariasari⁴, Evi Deliana⁵, Amir Hamzah⁶, Musfialdy⁷

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Riau

⁷Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau

*e-mail: enni.savitri@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Accountable financial management of village-owned enterprises (BUMDes) requires structured recording, human resource competence, internal control, and digital technology support. This community engagement program aimed to strengthen the capacity of managers of BUMDes Istana Mahligai, Muara Takus Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency, in digital financial management and reporting. The implementation used a participatory approach through problem identification, planning, training, mentoring, system development and testing, monitoring, and evaluation. The results indicate the establishment of a system foundation integrating digital general journals, automated financial reports, user management, business-unit transaction classification, financial monitoring dashboards, a marketplace for local SME products and tourism packages, offline transaction input, and AI-based summary and recommendation features. The mentoring process also strengthened managers' knowledge, practical skills, managerial capabilities, and digital literacy. The program initiated a transition from manual administration toward a more integrated, traceable, transparent, and data-driven governance model to support BUMDes performance and sustainable village development.

Keywords: BUMDes, digitalization, financial reporting, e-monitoring, village development

Abstrak

Pengelolaan keuangan BUMDes yang akuntabel membutuhkan pencatatan yang terstruktur, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan dukungan teknologi digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes Istana Mahligai, Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis digital. Metode penerapan menggunakan pendekatan partisipatif melalui identifikasi permasalahan, perencanaan, pelatihan, pendampingan, pengembangan dan uji coba sistem, monitoring, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 85% setelah pelatihan dan pendampingan. Kemampuan peserta dalam pencatatan transaksi meningkat dari 50% menjadi 90%, penyusunan laporan keuangan dari 60 menjadi 90%, dan penggunaan sistem digital dari 40% menjadi 90%. Peserta juga memahami tersedianya fondasi sistem yang mengintegrasikan jurnal umum digital, otomatisasi laporan keuangan, manajemen pengguna, pemisahan transaksi berdasarkan unit usaha, dashboard monitoring, marketplace produk UKM dan paket wisata, input transaksi offline, serta fitur ringkasan dan rekomendasi berbasis AI. Pendampingan juga memperkuat pengetahuan, keterampilan, kemampuan manajerial, dan literasi teknologi pengelola. Program menghasilkan perubahan dari administrasi manual menuju tata kelola yang lebih terintegrasi, dapat ditelusuri, transparan, dan berbasis data untuk mendukung pengembangan BUMDes dan desa mandiri.

Kata kunci: BUMDes, digitalisasi, laporan keuangan, e-monitoring, desa mandiri

1. PENDAHULUAN

BUMDes merupakan instrumen kelembagaan yang dapat digunakan desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai penghubung antara potensi lokal, kegiatan ekonomi masyarakat, dan pemerintah desa. Karena itu, kualitas tata kelola BUMDes sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola transaksi, menyusun laporan, melakukan pengendalian, dan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

BUMDes Istana Mahligai berlokasi di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, wilayah yang memiliki potensi ekonomi berbasis pariwisata sejarah dan religi. Aktivitas usaha BUMDes mencakup jasa pariwisata seperti penyewaan lahan parkir, fasilitas wisata dan pemandu lokal, perdagangan produk UMKM berupa makanan khas dan kerajinan, serta potensi pengembangan homestay. Dari sisi hulu, BUMDes mengelola potensi lokal dan layanan wisata, sedangkan dari sisi hilir BUMDes berperan dalam pemasaran produk, pelayanan wisatawan, dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Namun, integrasi antara aktivitas hulu dan hilir belum optimal karena sistem informasi dan tata kelola keuangan belum terdigitalisasi secara memadai. Kondisi awal menunjukkan bahwa pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, belum terintegrasi antarunit usaha, dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang direncanakan. Keterbatasan kompetensi akuntansi dan teknologi informasi juga membuat proses pelaporan menjadi kurang efisien dan belum mampu menyediakan informasi secara cepat untuk kebutuhan pengambilan keputusan.

Permasalahan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis pencatatan. Lemahnya sistem pelaporan dapat berdampak pada akurasi informasi, transparansi, pengendalian internal, evaluasi kinerja unit usaha, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Ariska, Dasila, dan Sari menunjukkan pentingnya teknologi informasi akuntansi, kompetensi, dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes (Ariska et al., 2023). Temuan Lantowa dan Melynsyah juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat mendukung kinerja pengelolaan keuangan BUMDes (Lantowa et al., 2023). Selanjutnya, Sagala dan Siregar menghubungkan pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi akuntansi dengan transparansi kinerja keuangan BUMDes (Sagala & Siregar, 2023).

BUMDes merupakan instrumen kelembagaan yang dapat digunakan desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai penghubung antara potensi lokal, kegiatan ekonomi masyarakat, dan pemerintah desa. Karena itu, kualitas tata kelola BUMDes sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola transaksi, menyusun laporan, melakukan pengendalian, dan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

BUMDes Istana Mahligai berlokasi di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, wilayah yang memiliki potensi ekonomi berbasis pariwisata sejarah dan religi. Aktivitas usaha BUMDes mencakup jasa pariwisata seperti penyewaan lahan parkir, fasilitas wisata dan pemandu lokal, perdagangan produk UMKM berupa makanan khas dan kerajinan, serta potensi pengembangan homestay. Dari sisi hulu, BUMDes mengelola potensi lokal dan layanan wisata, sedangkan dari sisi hilir BUMDes berperan dalam pemasaran produk, pelayanan wisatawan, dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Namun, integrasi antara aktivitas hulu dan hilir belum optimal karena sistem informasi dan tata kelola keuangan belum terdigitalisasi secara memadai. Kondisi awal menunjukkan bahwa pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, belum terintegrasi antarunit usaha, dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang direncanakan. Keterbatasan kompetensi akuntansi dan teknologi informasi juga membuat proses pelaporan menjadi kurang efisien dan belum mampu menyediakan informasi secara cepat untuk kebutuhan pengambilan keputusan.

Permasalahan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis pencatatan. Lemahnya sistem pelaporan dapat berdampak pada akurasi informasi, transparansi, pengendalian internal, evaluasi kinerja unit usaha, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Ariska, Dasila, dan Sari menunjukkan pentingnya teknologi informasi akuntansi, kompetensi, dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes (Ariska et al., 2023). Temuan Lantowa dan Melynsyah juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat mendukung kinerja pengelolaan keuangan BUMDes (Lantowa et al., 2023). Selanjutnya, Sagala dan Siregar menghubungkan pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi akuntansi dengan transparansi kinerja keuangan BUMDes (Sagala & Siregar, 2023).

Permasalahan prioritas yang dihadapi mitra terdiri atas lima kelompok. Pertama, sistem laporan keuangan masih sederhana, belum terstandarisasi, dan belum terintegrasi antarunit

usaha. Kondisi tersebut menyebabkan penyusunan laporan laba rugi, neraca, dan evaluasi kinerja menjadi lebih sulit. Kedua, literasi akuntansi dan digital pengelola masih terbatas sehingga terdapat ketergantungan pada pendamping dalam proses pelaporan. Ketiga, pengendalian internal dan dokumentasi transaksi belum optimal sehingga meningkatkan risiko salah catat dan menyulitkan penelusuran transaksi. Keempat, belum tersedia sistem informasi keuangan terintegrasi yang dapat memberikan informasi secara real-time. Kelima, kelemahan tersebut berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan dan optimalisasi pengembangan unit usaha.

Solusi yang ditawarkan dirancang dengan prinsip bahwa digitalisasi harus disertai penguatan kapasitas pengguna. Sistem informasi tidak akan menghasilkan perubahan tata kelola apabila pengelola belum memahami logika transaksi, akun, debit-kredit, dokumentasi bukti, serta fungsi laporan keuangan. Karena itu, program memadukan pelatihan literasi akuntansi dan digital, pengembangan sistem, praktik langsung, pendampingan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi. Pendekatan pelatihan berbasis teknologi juga telah diterapkan dalam kegiatan pengabdian pada BUMDes di daerah lain dan menunjukkan pentingnya praktik langsung dalam meningkatkan kemampuan pengelola (Oktari & Larasari, 2023).

Program memiliki keterkaitan dengan agenda penguatan desa mandiri, inovasi teknologi, dan tata kelola kelembagaan. Dalam proposal, digitalisasi laporan keuangan dan e-monitoring ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan teknologi informasi dan produk inovasi yang mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Program juga diarahkan mendukung SDG 9 melalui penguatan infrastruktur dan inovasi digital di tingkat desa serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Alfian et al., 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan tata kelola keuangan BUMDes yang terintegrasi, transparan, dan berbasis data dengan praktik pengelolaan yang masih manual. Kesenjangan ini menjadi dasar penting perlunya intervensi melalui digitalisasi sistem sekaligus penguatan kompetensi pengelola agar perubahan tata kelola dapat berkelanjutan.

Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangan BUMDes melalui sistem laporan keuangan berbasis digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Secara khusus, program diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam akuntansi dan teknologi informasi, menghasilkan laporan yang akurat, transparan dan terstandarisasi, mendorong penerapan e-monitoring, serta memperkuat pengendalian internal dan akuntabilitas kelembagaan. Tujuan tersebut juga berkontribusi pada IKU UNRI melalui pengalaman mahasiswa di luar kampus, aktivitas dosen di luar kampus, dan pemanfaatan hasil kerja dosen oleh masyarakat.

2. METODE

Kegiatan dilaksanakan pada BUMDes Istana Mahligai, Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Program merupakan tahun pertama dari rencana dua tahun, dengan mitra produktif berupa BUMDes dan lingkup permasalahan utama pada sistem pelaporan keuangan. Jarak lokasi mitra dari Universitas Riau tercatat sekitar 100 km.

Metode penerapan menggunakan pendekatan partisipatif. Tahapan kegiatan meliputi: (1) identifikasi permasalahan dan kondisi eksisting; (2) perencanaan solusi dan penetapan target; (3) pengembangan sistem dan penyesuaian dengan proses bisnis; (4) pelatihan manajerial, akuntansi, dan teknis; (5) pendampingan penggunaan sistem; (6) uji coba dan perbaikan; (7) monitoring dan evaluasi; serta (8) penyusunan rekomendasi dan rencana keberlanjutan. Tahapan tersebut mengikuti rancangan IPTEKS dalam proposal yang menekankan identifikasi, analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, monitoring-evaluasi, dan rekomendasi.

Partisipasi mitra menjadi komponen utama. Pengelola BUMDes dan pemerintah desa dilibatkan dalam identifikasi masalah, penyusunan rencana, pelatihan, uji coba, penyediaan data dan informasi transaksi, pemberian umpan balik, serta monitoring. Dengan demikian, sistem

tidak ditempatkan sebagai produk yang sepenuhnya ditentukan oleh tim, melainkan sebagai hasil penyesuaian terhadap kebutuhan operasional mitra.

Metode penerapan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan mitra sejak identifikasi permasalahan hingga evaluasi. Tahapan kegiatan meliputi: (1) identifikasi permasalahan dan kondisi eksisting; (2) perencanaan solusi dan penetapan target; (3) pengembangan serta penyesuaian sistem dengan proses bisnis BUMDes; (4) pelatihan manajerial, akuntansi, dan teknologi informasi; (5) pendampingan penggunaan sistem; (6) uji coba dan penyempurnaan sistem; (7) monitoring dan evaluasi; serta (8) penyusunan rekomendasi dan rencana keberlanjutan.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi: (1) peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar-dasar akuntansi dan pengelolaan keuangan; (2) peningkatan keterampilan melakukan input dan pengelolaan transaksi digital; (3) kemampuan peserta menghasilkan laporan keuangan melalui sistem; (4) peningkatan kemampuan menggunakan fitur monitoring dan dashboard; (5) berkurangnya kesalahan pencatatan transaksi; dan (6) meningkatnya kemandirian peserta dalam menggunakan sistem tanpa ketergantungan pada tim pendamping.

Evaluasi dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test*, lembar observasi praktik, serta kuesioner evaluasi kepuasan dan kebermanfaatan sistem. Aspek yang dinilai mencakup pengetahuan akuntansi, keterampilan penggunaan sistem, kemampuan penyusunan laporan keuangan, pemahaman pengendalian internal, dan literasi digital. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan membandingkan skor rata-rata *pre-test* dan *post-test* serta menghitung persentase peningkatan kemampuan peserta. Hasil observasi praktik digunakan sebagai data pendukung untuk menilai tingkat kemandirian peserta.

Pada tahap identifikasi, tim mengevaluasi proses pencatatan dan pelaporan yang berjalan, melakukan wawancara dengan pengelola BUMDes, serta memetakan kebutuhan informasi. Tahap ini menghasilkan pemetaan bahwa persoalan BUMDes merupakan kombinasi antara akuntansi, sumber daya manusia, pengendalian internal, dan integrasi informasi. Karena itu, desain intervensi tidak hanya berorientasi pada pembuatan aplikasi, tetapi juga perubahan proses bisnis dan peningkatan kemampuan pengguna.

Tahap pengembangan sistem dilakukan dengan membentuk struktur pengguna yang membedakan kewenangan. Sistem memiliki aktor Admin, Admin BUMDes, Direktur BUMDes, dan Kepala Desa. Admin BUMDes berfungsi mengelola akun dan memasukkan jurnal umum, sedangkan Direktur BUMDes dan Kepala Desa dapat memonitor laporan yang dihasilkan. Pembagian hak akses merupakan bentuk awal pengendalian berbasis akses karena memisahkan fungsi input dan monitoring.

Pada tahap pelatihan, materi diarahkan pada pemahaman transaksi, akun, debit dan kredit, jurnal umum, pengelompokan transaksi berdasarkan unit usaha, penyusunan laporan, penggunaan dashboard, serta monitoring. Pelatihan menggunakan diskusi, simulasi, dan praktik langsung. Pendekatan ini dipilih agar pengelola tidak hanya mengetahui konsep, tetapi mampu menjalankan proses pencatatan secara mandiri. Proposal juga mengatur pelatihan yang inklusif dan ramah gender, termasuk waktu yang fleksibel, materi yang mudah dipahami, mentor perempuan, serta pendampingan teknis berkelanjutan bagi perempuan pengelola BUMDes.

Pada tahap implementasi, pengelola memasukkan transaksi berdasarkan tanggal transaksi, nama akun, posisi debit atau kredit, nomor transaksi, bukti transaksi, dan unit usaha. Ketepatan tanggal, akun, posisi saldo, dan nilai transaksi menjadi perhatian karena data tersebut merupakan dasar pembentukan laporan. Nomor transaksi dan bukti transaksi juga digunakan untuk memudahkan penelusuran. Pemisahan berdasarkan unit usaha memungkinkan kinerja setiap unit dianalisis secara lebih spesifik.

Evaluasi dilakukan dengan melihat perubahan pada empat dimensi keberdayaan, yaitu pengetahuan, keterampilan, manajemen, dan teknologi. Pengetahuan mencakup pemahaman transaksi, jurnal, laporan, sistem, dashboard, dan pengendalian. Keterampilan mencakup kemampuan input transaksi, pengelolaan akun, pengelompokan unit usaha, pembuatan laporan, dan pembacaan dashboard. Dimensi manajemen menilai kemampuan menggunakan informasi

keuangan untuk monitoring dan keputusan, sedangkan dimensi teknologi melihat pergeseran dari manual menuju digital terintegrasi dan analitik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa program tahun pertama telah menghasilkan fondasi transformasi digital tata kelola keuangan BUMDes. Capaian utama bukan hanya berupa keberadaan sistem, tetapi perubahan rancangan proses bisnis dari pencatatan manual menuju pencatatan yang lebih terstruktur, data yang dapat dikonsolidasikan, laporan yang dapat dihasilkan secara otomatis, serta informasi yang dapat digunakan untuk monitoring dan pengambilan keputusan (Nugrahaningsih, 2022)

Perubahan tersebut penting karena digitalisasi yang hanya mengganti media pencatatan tanpa memperbaiki alur informasi tidak cukup untuk membangun tata kelola. Dalam kegiatan ini, sistem dirancang untuk menghubungkan transaksi, pelaporan, unit usaha, monitoring, pemasaran, dan informasi kinerja. Dengan pendekatan tersebut, teknologi ditempatkan sebagai infrastruktur tata kelola, bukan sekadar alat administrasi. Dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di BumDes

Digitalisasi Pencatatan dan Pengendalian Transaksi

Capaian pertama adalah pengembangan sistem jurnal umum digital. Sistem memungkinkan Admin BUMDes memasukkan tanggal transaksi, nama akun, debit/kredit, nomor transaksi, bukti transaksi, dan unit usaha. Struktur tersebut membangun jejak transaksi yang dapat ditelusuri. Dengan adanya nomor transaksi dan dokumentasi, proses pemeriksaan dapat diarahkan kembali kepada sumber transaksi sehingga memperkuat *traceability*.

Pengelompokan transaksi berdasarkan unit usaha juga memberikan manfaat manajerial. Sebelum integrasi, transaksi antarunit relatif sulit dibandingkan karena pencatatan belum terkonsolidasi. Setelah sistem dikembangkan, transaksi dapat dikaitkan dengan unit usaha sehingga informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi pendapatan, pengeluaran, dan kinerja masing-masing unit. Capaian ini secara langsung menjawab permasalahan awal berupa sulitnya memantau kinerja tiap unit usaha.

Dari sisi pengendalian internal, pembagian hak akses menjadi mekanisme penting. Admin BUMDes mempunyai kewenangan input dan pengelolaan akun, sementara Direktur BUMDes dan Kepala Desa mempunyai fungsi monitoring. Struktur ini mengurangi risiko seluruh proses transaksi dan pelaporan berada pada satu pihak. Penguatan pengendalian relevan dengan hasil

penelitian Savitri, et al., yang menunjukkan pentingnya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Savitri et al., 2020).

Otomatisasi Pelaporan Keuangan

Capaian berikutnya adalah rancangan alur otomatisasi laporan. Jurnal umum menjadi sumber data yang digunakan sistem untuk menghasilkan buku besar, laporan laba rugi, neraca saldo, dan laporan keuangan. Dengan mekanisme tersebut, proses pelaporan bergeser dari pola mencatat transaksi kemudian menyusun laporan secara manual menjadi mencatat transaksi satu kali dan memanfaatkan data tersebut untuk menghasilkan berbagai informasi keuangan. Sistem juga dirancang untuk menunjukkan apakah neraca saldo dalam kondisi seimbang. Jika tidak seimbang, kondisi tersebut menjadi indikator adanya kesalahan dalam input atau penyusunan jurnal.

Perubahan tersebut berpotensi mengurangi pencatatan berulang dan mempercepat proses penyusunan laporan. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai digitalisasi laporan keuangan BUMDes yang menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mendukung optimalisasi peran BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa (Savitri et al., 2022); (Diyanto, 2022).

Dashboard dan E-Monitoring

Dashboard dikembangkan sebagai ringkasan kondisi keuangan yang dapat digunakan oleh pengelola untuk melihat transaksi penerimaan, transaksi pengeluaran, saldo akhir, pendapatan, pengeluaran, informasi unit usaha, dan ringkasan arus kas. Informasi tersebut memungkinkan Direktur BUMDes dan Kepala Desa memperoleh gambaran kondisi keuangan tanpa harus menelusuri seluruh transaksi secara manual.

Secara substantif, dashboard mengubah fungsi laporan dari dokumen pertanggungjawaban menjadi instrumen pengendalian manajemen. Pengelola dapat melihat unit usaha yang menghasilkan pendapatan, besarnya pengeluaran, posisi saldo, pola arus kas, dan unit usaha yang relatif lebih menguntungkan. Dengan demikian, sistem mulai membangun decision making berbasis data. Capaian ini relevan dengan temuan Situmorang, Sanga, dan Sogen yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan penggunaan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan BUMDes (Syahza, 2021).

Integrasi BUMDes, UKM, dan Potensi Pariwisata

Sistem yang dikembangkan tidak dibatasi pada pelaporan keuangan internal. Salah satu capaian strategis adalah pengembangan fungsi marketplace desa yang menghubungkan BUMDes dengan UKM masyarakat. Fitur tersebut memungkinkan UKM mendaftarkan produk, memasarkan produk unggulan desa, menawarkan barang dan jasa, menentukan harga, mengatur promosi atau diskon, serta menawarkan paket wisata. Transaksi offline juga dapat dimasukkan secara manual agar tetap tercatat dalam sistem.

Integrasi ini memiliki konsekuensi penting terhadap model bisnis BUMDes. BUMDes tidak hanya diposisikan sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan, tetapi berkembang menjadi platform penghubung antara unit usaha BUMDes, UKM, produk lokal, dan sektor pariwisata. Produk atau jasa yang dipasarkan melalui marketplace dapat berkontribusi pada informasi pendapatan, sementara BUMDes dapat memperoleh fee atau income dari aktivitas pemasaran. Paket wisata juga dapat diarahkan pada potensi kawasan Candi Muara Takus. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Syahza et al. mengenai inovasi pemasaran produk pertanian melalui BUMDes dan pemberdayaan UMKM (Savitri, 2019).

Integrasi hulu-hilir menjadi penting karena kelemahan sebelumnya bukan hanya pada pencatatan, tetapi juga keterhubungan informasi antaraktivitas ekonomi. Ketika data transaksi, unit usaha, pemasaran, dan laporan keuangan dapat dikaitkan, pengelola mempunyai basis informasi yang lebih baik untuk menilai kontribusi setiap aktivitas terhadap kinerja BUMDes.

Penguatan Kapasitas dan Keberdayaan Mitra

Keberhasilan kegiatan tidak diukur hanya berdasarkan tersedianya sistem. Sasaran yang lebih penting adalah kemampuan mitra menggunakan sistem untuk menyelesaikan masalah

secara mandiri. Pada aspek pengetahuan, pengelola memperoleh pemahaman mengenai transaksi, jurnal umum, laporan keuangan, dashboard, sistem digital, dan pengendalian internal. Pada aspek keterampilan, pengelola diarahkan mampu melakukan input transaksi, mengelola akun, mengelompokkan transaksi berdasarkan unit usaha, menghasilkan laporan, membaca dashboard, dan melakukan monitoring.

Pada aspek manajemen, mitra mulai memiliki kemampuan menggunakan informasi keuangan untuk memonitor unit usaha, membandingkan pendapatan dan pengeluaran, mendukung keputusan, serta mendokumentasikan transaksi secara sistematis. Pada aspek teknologi, terjadi perubahan arah dari manual menuju digital terintegrasi dan selanjutnya menuju analitik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa program mulai membangun kapabilitas organisasi, bukan sekadar menghasilkan perangkat lunak.

Penguatan kapasitas tersebut konsisten dengan pendekatan pendampingan yang menempatkan mitra sebagai pengguna sekaligus pemberi umpan balik. Pengelola BUMDes dilibatkan sejak identifikasi kebutuhan, desain aplikasi, uji coba, implementasi, hingga evaluasi. Mereka menyediakan data dan informasi transaksi, menjelaskan proses bisnis, mengikuti pelatihan, serta mengidentifikasi kendala teknis dan administratif bersama tim pengabdian.

Analisis Perubahan Kondisi Mitra

Perbandingan kondisi awal dan capaian menunjukkan bahwa solusi yang diterapkan mempunyai keterkaitan langsung dengan masalah prioritas. Pencatatan manual dijawab dengan digitalisasi jurnal; laporan yang belum terintegrasi dijawab dengan otomatisasi; keterlambatan informasi dijawab dengan dashboard; keterbatasan literasi dijawab dengan pelatihan dan pendampingan; pengendalian yang lemah dijawab melalui hak akses dan penelusuran transaksi; kesulitan memantau unit usaha dijawab melalui pemisahan unit; keterbatasan pemasaran dijawab dengan marketplace; dan kebutuhan analisis dijawab dengan fitur ringkasan/rekomendasi AI. Sistem pembayaran yang belum terintegrasi telah diidentifikasi sebagai kebutuhan pengembangan pada tahun berikutnya.

Dampak terhadap Tata Kelola BUMDes

Dari perspektif tata kelola, hasil pengabdian menunjukkan perubahan pada tiga lapisan. Pertama, administrative governance, yaitu perbaikan proses pencatatan dan dokumentasi transaksi. Kedua, financial governance, yaitu data transaksi mulai dapat digunakan untuk menghasilkan laporan dan monitoring. Ketiga, managerial governance, yaitu informasi keuangan diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi unit usaha.

Perubahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi instrumen penguatan akuntabilitas apabila dibangun bersama mekanisme pengendalian dan peningkatan kapasitas. Penelitian Savitri, Andreas, Diyanto, dan Gumanti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Provinsi Riau memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan (Savitri et al., 2022). Demikian pula, Savitri et al, menemukan pentingnya sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Savitri et al., 2023).

Dalam konteks BUMDes Istana Mahligai, manfaat utama tahap pertama bukan klaim peningkatan laba yang belum diukur secara longitudinal, melainkan terbentuknya infrastruktur tata kelola dan kapasitas yang memungkinkan pengukuran kinerja dilakukan dengan lebih baik pada tahap berikutnya. Sikap ini penting agar capaian pengabdian tidak dilebihkan: hasil tahun pertama menunjukkan fondasi sistem, perubahan proses, dan peningkatan kapasitas, sementara dampak finansial jangka panjang masih memerlukan observasi lanjutan.

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan diarahkan pada pemantapan penggunaan sistem dalam aktivitas keuangan aktual BUMDes, bukan lagi sekadar pengenalan teknologi. Pengelola diharapkan mampu melakukan input transaksi harian, memilih akun, mencatat debit dan kredit, mengelompokkan transaksi berdasarkan unit usaha, mengolah data, serta menghasilkan buku besar, laporan laba rugi, neraca saldo, dan laporan keuangan. Pendampingan lanjutan dilakukan melalui monitoring berkala, konsultasi, troubleshooting, evaluasi, dan penyempurnaan fitur berdasarkan umpan balik mitra.

Pengendalian internal juga perlu diperkuat melalui dokumentasi bukti transaksi, penomoran transaksi, pemeriksaan keseimbangan laporan, pembagian kewenangan pengguna, dan monitoring oleh Direktur BUMDes serta Kepala Desa. Pada saat yang sama, literasi akuntansi dan digital perlu dipelihara melalui pelatihan berkala dan pendampingan. Keterlibatan perempuan dalam penggunaan sistem juga menjadi bagian dari agenda penguatan keberdayaan sehingga transformasi digital tidak menghasilkan eksklusi baru.

Pengembangan tahap berikutnya perlu memperhatikan kebutuhan yang telah teridentifikasi, terutama integrasi sistem pembayaran. Integrasi tersebut penting agar transaksi digital dapat tercatat secara lebih konsisten dan mengurangi pekerjaan manual, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 mengenai capaian program dan perubahan kondisi mitra. Selain itu, fitur analitik berbasis AI perlu ditempatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan pengganti penilaian pengelola. Hasil evaluasi peserta melalui pre-test dan post-test sebagaimana disajikan pada Tabel 2 juga menjadi dasar untuk menilai perubahan pemahaman setelah program dilaksanakan. Dengan demikian, rekomendasi sistem tetap perlu ditinjau berdasarkan bukti transaksi, konteks unit usaha, dan kebijakan BUMDes.

Tabel 1. Capaian Program dan Perubahan Kondisi Mitra

No.	Indikator Capaian	Kondisi Sebelum Kegiatan	Capaian Setelah Kegiatan	Bukti/Output	Target/Capaian
1	Jumlah peserta pelatihan	Pengelola belum memperoleh pelatihan terpadu mengenai sistem keuangan digital	20 peserta mengikuti pelatihan dan pendampingan	Daftar hadir, dokumentasi kegiatan, sertifikat	20 peserta / 100%
2	Pemahaman akuntansi dan pengelolaan keuangan	Pemahaman belum seragam dan sebagian proses masih bergantung pada pendamping	Peserta memahami transaksi, akun, debit-kredit, dan alur laporan keuangan	Hasil pre-test dan post-test	Meningkat
3	Kemampuan penggunaan sistem digital	Pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual	Peserta mampu melakukan input dan mengelola transaksi melalui sistem	Screenshot jurnal digital, hasil praktik	20 peserta mampu menggunakan sistem
4	Jurnal umum digital	Pencatatan belum terintegrasi dan sulit ditelusuri	Tersedia jurnal umum digital dengan tanggal, akun, debit/kredit, nomor transaksi, bukti transaksi, dan unit usaha	Bukti jurnal umum digital	Sistem tersedia dan digunakan
5	Pemisahan transaksi unit usaha	Transaksi antarunit usaha belum terkonsolidasi secara sistematis	Transaksi dapat dikelompokkan berdasarkan unit usaha	Database/screenshot unit usaha	Seluruh transaksi dapat diklasifikasikan
6	Otomatisasi laporan keuangan	Penyusunan laporan masih membutuhkan proses manual dan berulang	Data jurnal dapat digunakan untuk menghasilkan buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan laporan keuangan	Bukti laporan otomatis	Sistem berfungsi

No.	Indikator Capaian	Kondisi Sebelum Kegiatan	Capaian Setelah Kegiatan	Bukti/Output	Target/Capaian
7	Dashboard monitoring	Informasi keuangan harus ditelusuri dari dokumen transaksi	Informasi penerimaan, pengeluaran, saldo, pendapatan, dan unit usaha dapat dipantau melalui dashboard	Screenshot dashboard/e-monitoring	Dashboard tersedia dan dapat digunakan
8	Pengendalian internal	Dokumentasi dan penelusuran transaksi belum optimal	Tersedia nomor transaksi, bukti transaksi, serta pembagian hak akses pengguna	Log transaksi dan pengaturan user	Pengendalian lebih terstruktur
9	Marketplace BUMDes	Pemasaran produk dan jasa masih dilakukan secara konvensional	Tersedia fitur pemasaran produk UKM dan paket wisata	Screenshot marketplace	Marketplace tersedia
10	Literasi digital	Kemampuan menggunakan teknologi keuangan masih terbatas	Peserta mampu menggunakan fitur utama sistem secara praktik	Lembar observasi praktik	Kemampuan meningkat
11	Kemandirian peserta	Pengelola masih membutuhkan bantuan dalam proses pencatatan dan pelaporan	Peserta mampu melakukan input transaksi dan menghasilkan laporan dengan pendampingan minimal	Hasil observasi praktik	Minimal 80% peserta mampu mandiri
12	Pemahaman sistem sebelum-sesudah pelatihan	Diukur melalui pre-test	Diukur kembali melalui post-test	Rekap nilai pre-test dan post-test	Terdapat peningkatan skor

Tabel 2. Evaluasi Pre-Test dan Post-Test Peserta

No.	Aspek yang Dievaluasi	Jumlah Peserta	Pre-Test (Rata-rata)	Post-Test (Rata-rata)	Peningkatan
1	Pemahaman dasar akuntansi	20	56%	84%	28 poin
2	Pemahaman debit dan kredit	20	52%	82%	30 poin
3	Kemampuan pencatatan transaksi	20	48%	86%	38 poin
4	Kemampuan menggunakan jurnal digital	20	42%	88%	46 poin
5	Kemampuan menghasilkan laporan keuangan	20	45%	85%	40 poin
6	Kemampuan menggunakan dashboard	20	40%	83%	43 poin
7	Pemahaman pengendalian internal	20	50%	81%	31 poin
8	Literasi teknologi digital	20	46%	87%	41 poin
Ratarata		20	47,4%	85,8%	38,4 poin

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Peningkatan diukur melalui perbandingan skor pre-test dan post-test yang mencakup pemahaman akuntansi, pencatatan transaksi, penggunaan jurnal digital, penyusunan laporan keuangan, dashboard monitoring, pengendalian internal, dan literasi teknologi. Selain peningkatan pengetahuan, hasil observasi praktik menunjukkan bahwa peserta mulai mampu melakukan input transaksi, mengelompokkan transaksi berdasarkan unit usaha, serta menghasilkan informasi keuangan melalui sistem.

Dengan demikian, capaian program tidak hanya dibuktikan melalui tersedianya produk teknologi berupa jurnal digital, dashboard, otomatisasi laporan, dan marketplace, tetapi juga melalui perubahan kapasitas pengguna. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi BUMDes diukur melalui kombinasi antara capaian produk, peningkatan kompetensi peserta, dan kemampuan mitra dalam menggunakan sistem secara mandiri.

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat pada BUMDes Istana Mahligai telah menghasilkan fondasi transformasi digital tata kelola keuangan sebagai bagian dari pengembangan desa mandiri. Program berhasil mengarahkan perubahan dari pencatatan manual menuju sistem yang lebih terintegrasi melalui jurnal umum digital, otomatisasi laporan, dashboard monitoring, manajemen pengguna, pemisahan unit usaha, marketplace, input transaksi offline, dan fitur ringkasan/rekomendasi berbasis AI. Kegiatan pengabdian bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes Istana Mahligai dalam pengelolaan keuangan digital, pencatatan, pelaporan, pengendalian internal, dan pengambilan keputusan berbasis data. Peserta berjumlah 20 orang, terdiri atas pengelola BUMDes dan unsur pemerintah Desa Muara Takus. Kegiatan menghasilkan fondasi transformasi digital melalui jurnal umum digital, otomatisasi laporan keuangan, dashboard monitoring, manajemen pengguna, pemisahan unit usaha, marketplace, input transaksi offline, serta fitur AI. Program juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, manajerial, dan literasi teknologi peserta. Kegiatan lanjutan diarahkan pada penggunaan sistem secara mandiri, integrasi pembayaran digital, penguatan pengendalian, peningkatan kualitas laporan, serta pengukuran dampak terhadap efisiensi, kinerja unit usaha, dan pendapatan BUMDes.

Keberhasilan program juga terlihat dari penguatan keberdayaan mitra pada aspek pengetahuan, keterampilan, manajemen, dan teknologi. Pengelola tidak hanya diperkenalkan pada sistem, tetapi dilibatkan dalam identifikasi masalah, pengembangan, uji coba, dan penggunaan sistem. Dari perspektif tata kelola, program memperkuat administrative governance, financial governance, dan managerial governance.

Namun, hasil tahun pertama harus dipahami sebagai fondasi, bukan akhir transformasi. Penggunaan sistem secara mandiri, integrasi pembayaran, konsistensi pencatatan, penguatan pengendalian internal, dan pengukuran dampak terhadap kinerja ekonomi BUMDes masih memerlukan keberlanjutan. Karena itu, tahap berikutnya perlu berfokus pada pemanfaatan sistem dalam transaksi aktual, monitoring berkala, penyempurnaan fitur, peningkatan literasi, serta evaluasi dampak secara lebih terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau atas dukungan pendanaan, fasilitasi, dan pembinaan dalam pelaksanaan Program Desa Binaan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini didukung melalui DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2026 berdasarkan Kontrak Nomor 816/UN19.5.1.3/AL.04.03/2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian M, Kartika D, Ferida A., (2022). Implementasi sistem informasi akuntansi dan administrasi berbasis digital. *DIKEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6(1):32–37. doi:10.32486/dikemas.v6i1.247.
- Ariska I, Dasila RA, Sari N., (2023). Pengaruh teknologi informasi akuntansi, kompetensi, dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. *Jurnal Jesya*. 6:1447–1458. doi:10.36778/jesya.v6i2.1125.
- Diyanto V, Musfi PN., (2022). Digitalisation of financial report of village owned enterprise. *Indonesian Journal of Economics, and Humanities*, 4(3):205–210. doi:10.31258/ijesh.4.3.205-210.
- Lantowa FD, Melynsyah Y., (2023). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*. 2023;7(2):51–60.
- Nugrahaningsih P, Rahmawati LDA, Arista D, Ardila LN., (2022). Knowledge transfer for community development dengan aplikasi Excel PKN STAN pada penyusunan laporan keuangan BUMDes: studi pada BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun. Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5(2):96–103. doi:10.24198/kumawula.v5i2.36321.
- Oktari V, Larasati S., (2023). Pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi digital pada BUMDes Tanjung Indah Curup Selatan Rejang Lebong. *ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat*. 1(1):41–48. doi:10.59246/alkhidmah.v1i1.179.
- Probowulan D, Oktavianto H, Dimas DK, Muh Nur IF. (2021). Urgensi pelaporan keuangan digital BUMDes Amanah Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2(2):98–103. doi:10.32528/jpmm.v2i2.4967.
- Sagala MKA, Siregar S. (2023). Pengelolaan keuangan sistem informasi akuntansi dan transparansi kinerja keuangan pada BUMDes. *E-Jurnal Akuntansi*., 33(6):1613. doi:10.24843/EJA.2023.v33.i06.p015.
- Savitri E, Andreas, Diyanto V., (2022). Gumanti TA. Accountability of village fund management in Riau Province. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*. 14(2). doi:10.23969/jrak.v14i2.5550.
- Savitri E, Andreas, Diyanto V., (2019). Accountability of village funds management. *Journal of Application Management*. 17(3):515–521. doi:10.21776/ub.jam.2019.017.03.16.
- Savitri E, Andreas, Diyanto V., (2022). Pendampingan keuangan BUMDes berbasis web. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*. 2(6):268–277. doi:10.31258/cers.2.6.268-277.
- Savitri E, Andreas, Diyanto V., (2019). Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa: studi pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Unri Conference Series: Community Engagement*. 1:606–613. doi:10.31258/unricsce.1.606-613.
- Savitri E, Diyanto V, Abdullah NHN.. (2023). The effect of internal control systems, community participation, and village financial system on the accountability of village fund management: *prosocial behavior as moderation*. 6(6):772–789.
- Savitri E, Gumanti TA, Andreas, Diyanto V., (2020). The effect of leadership, internal control system and organizational commitment on accountability of village financial management. *Journal of Application Management*. 18(3):522–532. doi:10.21776/ub.jam.2020.018.03.12.
- Syahza A, Savitri E, Asmit B, Meiwanda., (2021). Small-scale agricultural product marketing innovation through BUMDes and MSMEs empowerment in coastal areas. *Management Sciences Letters*. 11(8):2291–2300. doi:10.5267/j.msl.2021.3.015.
- Hasibuan ER, Adam DH, Hasibuan LR, Syahputra R, Rohani, Nazliah R, Sari MN., (2026). Penguatan Pemasaran Digitalisasi UMKM Melalui Integrasi Google Maps Dan Marketplace. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 7(2): 271–277. DOI:10.54951/comsep.v7i2.1333.